

# SARASEHAN NASIONAL ANTROPOLOGI 2010<sup>1</sup>

“Re-invensi Antropologi Indonesia di Era  
Demokrasi dan Globalisasi”

Cisarua, 21-23 Juli 2010

---

## SEMINAR ANTROPOLOGI TERAPAN “Antropologi dalam Lintasan Pembangunan Indonesia”

### ANTROPOLOGI, GENDER, MIGRASI GLOBAL DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Pinky Saptandari  
Departemen Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Airlangga



---

<sup>1</sup> Copyright of Forum Kajian Antropologi Indonesia, 2010. This publication is a copyright and remains the intellectual property of Forum Kajian Antropologi Indonesia and its writer. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia and the writer

# ANTROPOLOGI, GENDER, MIGRASI GLOBAL DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Pinky Saptandari \*)  
Departemen Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Universitas Airlangga

## Pengantar

Makalah ini difokuskan pada pembahasan tentang posisi antropologi berkaitan dengan isu gender dalam perspektif pembangunan bangsa, dalam Seminar Antropologi Terapan yang bertema “**Antropologi dalam Lintasan Pembangunan Indonesia**”. Secara spesifik tulisan ini akan menguraikan tentang: kontribusi antropologi bagi pembangunan bangsa, antropologi dan permasalahan gender, serta perempuan buruh migran dan feminisme.

Apakah kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan ketenaga kerjaan sudah menerapkan pembangunan responsif gender dengan menjalankan strategi pengarusutamaan gender (PUG) melalui Inpres No.9/2000? Bagaimana dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan buruh migran? Bagaimana dengan pendidikan, kesehatan dan gizi, serta tumbuh-kembang optimal bagi anak-anak mereka? Makalah ini mencoba menguraikan dengan mengambil studi kasus perempuan buruh migrant Jawa Timur yang bekerja di Hongkong.

## Kontribusi Antropologi Bagi Pembangunan Bangsa

Adanya permasalahan yang sangat kompleks yang banyak dialami perempuan membutuhkan adanya kajian dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah peran ilmu antropologi.

Ilmu Antropologi mengembangkan kajian yang memperlihatkan hubungan yang erat antara lingkungan fisik, organisasi sosial dan kebudayaan yang berpengaruh pada pola kehidupan manusia, termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, seni, dan lain-lain. Dengan menerapkan Ilmu Antropologi dapat dideskripsikan berbagai keragaman kebiasaan masyarakat yang didasarkan pada keragaman budaya. Keragaman budaya tercermin dalam tradisi, kebiasaan, kepercayaan, mitos, stereotype, tabu, kebiasaan, gaya hidup, dan lain-lain.

Sumbangan ilmu Antropologi bagi masyarakat terletak dalam tiga kategori utama. *Pertama*, ilmu Antropologi memberikan suatu cara yang jelas dalam memandang masyarakat secara keseluruhan maupun para anggota individu mereka; ilmu Antropologi menggunakan pendekatan yang menyeluruh (holistik), atau bersifat system, dimana peneliti secara tetap menanyakan bagaimana dari seluruh bagian dari system itu saling menyesuaikan dan bagaimana system itu dapat bekerja. Cara khas dari ilmu Antropologi juga menekankan pentingnya relativisme budaya dalam menilai cara-cara yang berlainan

dengan cara-cara kita sendiri, yaitu kebutuhan untuk menginterpretasikan bentuk-bentuk asli dalam konteks budaya dimana bentuk itu ada, dan bukan menilainya menurut ukuran Barat.

*Kedua*, Ilmu Antropologi memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses-proses perubahan sosial dan budaya, dan juga untuk membantu memahami keadaan masyarakat dalam melakukan respon terhadap kondisi yang berubah.

*Ketiga*, ahli Antropologi menawarkan kepada ilmu-ilmu lain suatu metodologi penelitian yang longgar dan efektif untuk menggali serangkaian masalah teoritis dan praktis yang sangat luas, yang dihadapi dalam berbagai program pembangunan.

Ilmu Antropologi menawarkan konsep tentang "premis-premis", atau "asumsi-asumsi" yang mendasari tingkahlaku, premis-premis yang menjadi kunci penting untuk memahami rasional dari perbuatan-perbuatan yang jika dipandang dari asumsi-asumsi budaya yang sangat berbeda, sering nampak tidak rasional. Perspektif Antropologi menawarkan dua konsep utama yang cocok untuk Ilmu-ilmu lain, yakni (1) Pendekatan Holistik, dan (2) Relativisme Budaya.

Dalam kerangka pendekatan holistik dan relativisme budaya ilmu antropologi dapat berperan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Bagaimana konsep dan teori dalam Ilmu Antropologi dapat diterapkan untuk kepentingan pembangunan bangsa dan Negara? Bagaimana Ilmu Antropologi secara spesifik dapat berperan dalam menganalisis, menguraikan dan mencari solusi dalam permasalahan bangsa, khususnya dalam pembangunan sumberdaya insani? Materi ini membahas secara singkat kontribusi antropologi dalam mengurai permasalahan gender dalam kasus perempuan buruh migran yang bekerja di Hongkong.

### **Antropologi & Permasalahan Gender**

Konsep dan teori antropologi dapat diterapkan dalam kajian secara spesifik yang mengurai tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana dapat ditemukan dalam materi perkuliahan 'Antropologi Gender', 'Antropologi Feminis', dan 'Antropologi Kependudukan'.

Sebagaimana diketahui, pada semua kebudayaan dijumpai permasalahan spesifik yang terkait dengan permasalahan gender dan budaya lokal, di mana terdapat pendefinisian dan pemaknaan tentang laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan konstruksi sosial tentang peran, relasi, kekuasaan, distribusi peran, konsep tentang tubuh, seksualitas, kesehatan, perkawinan dan lain-lain.

Terdapat mitos, tabu, stereotipe, dan kepercayaan-kepercayaan tentang peran, relasi laki-laki dan perempuan, kekuasaan, dan lain-lain. Terdapat juga mitos, tabu, stereotipe dan kepercayaan tentang tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan. Semuanya itu dapat dijumpai dengan mudah di semua kebudayaan yang didominasi oleh ideologi patriarki. Dalam kebudayaan dengan dominasi budaya Patriarki, laki-laki dikonstruksikan perkasa, kuat secara fisik dan seksual. Sebaliknya, perempuan dikonstruksikan dengan

kelemah-lembutan, kecantikan, didorong untuk selalu menjaga kecantikan wajah dan tubuh, kelangsingan, serta organ-organ seksual dan reproduksi.

Dalam masyarakat terdapat perbedaan perlakuan, termasuk dalam konsumsi makanan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada mitos, tabu dan stereotype tentang seksualitas. Ada makanan tertentu yang dianjurkan untuk dikonsumsi laki-laki karena mitos keperkasaan seperti mengonsumsi sate kambing. Ada makanan yang ditabukan bagi perempuan karena akan mengurangi kenikmatan hubungan seksual seperti buah mentimun dan nanas. Banyak larangan makanan ditujukan bagi perempuan terutama ketika dalam kondisi hamil. Perempuan hamil di daerah kebudayaan Mataraman tidak boleh makan telur, takut bayinya bila lahir akan bisulan dikepalanya. Masih banyak lagi contoh yang masih dapat ditemukan di beberapa kebudayaan.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa mitos, tabu, dan kepercayaan-kepercayaan makanan dan kesehatan yang berlaku dalam setiap masyarakat, dengan penjelasan-penjelasan budaya yang bermacam-macam, dapat dikatakan sebagai "bentuk pembatasan budaya" terhadap kecukupan gizi, yang pasti akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Kondisi gizi buruk yang dialami bayi dan balita di beberapa wilayah seperti yang ditemukan di beberapa desa di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat ditengarai bukan hanya masalah kemiskinan, namun juga dipengaruhi oleh faktor budaya setempat. Dalam hal inilah dapat dilihat bahwa dominasi budaya patriarki telah memberi pengaruh negatif terhadap kualitas serta kelangsungan hidup perempuan dan anak.

Berikut ini adalah data-data kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan bias gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi & ketenagakerjaan, dan politik:

- Buta Aksara perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Data Susenas (2007) menyatakan bahwa penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang buta aksara meliputi 10,12%, sedangkan penduduk laki-laki 4,34%.
- Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) 228 per 100.000 kelahiran (2007). Target MDGs tahun 2015 102/100.000 kelahiran.
- Adanya mitos, stereotype, dan kepercayaan-kepercayaan tentang seksualitas khas laki-laki yang dapat dijumpai pada hampir semua kebudayaan yang dominan dengan ideologi patriarki. Laki-laki dikonstruksikan perkasa, kuat secara seksual, sebaliknya perempuan dikonstruksikan dengan kelembutan, kecantikan, didorong untuk selalu menjaga kecantikan wajah dan tubuh, kelangsingan, serta organ-organ seksual dan reproduksi.
- Dalam Mitos, Tabu dan Stereotipe tentang seksualitas laki-laki dapat dilihat betapa pentingnya seksualitas dalam kehidupan seorang laki-laki yang dikaitkan dengan konsep keperkasaan. Konsep keperkasaan sangat kuat melekat dan merupakan hal yang dianggap sangat penting bagi laki-laki. Segala cara akan dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan keperkasaan.

- Terdapat perbedaan konsep tentang makanan berdasarkan gender yang didasarkan pada mitos, tabu dan stereotype tentang seksualitas. Ada larangan dan anjuran makanan berdasarkan perbedaan gender. Ada makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi laki-laki karena mendukung mitos keperkasaan seperti daging kambing. Sebaliknya, juga ada bahan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi laki-laki karena mitos membuat loyo, antara lain buah terung.
- Keluarga Berencana. Tidak dipahaminya tentang permasalahan infertilitas pada laki-laki secara medis ilmiah, mengakibatkan bila terjadi ketidak suburan pada pasangan suami-isteri, langsung dianggap sebagai permasalahan dan tanggung jawab isteri. Ada kecenderungan untuk menyalahkan pasangan/isteri apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan fertilitas.
- Perempuan dan anak dan rentan mengalami trafficking dan berbagai bentuk kekerasan.
- Jumlah tenaga kerja perempuan di dalam dan luar negeri meningkat. Namun, didominasi dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 49,52%, jauh lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 83,68%.
- Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2009 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan melalui keterwakilan di DPR-RI masih rendah, yaitu sekitar 17,4% dan di DPD-RI sekitar 27%.

Adanya berbagai pembatasan budaya dalam bentuk mitos, tabu, stereotype, kepercayaan-kepercayaan yang merupakan konstruksi budaya patriarki, berpengaruh terhadap kualitas hidup perempuan dan anak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas Sumberdaya manusia Indonesia. Pembatasan budaya akan mempengaruhi kualitas hidup perempuan yang secara langsung terkena pembatasan-pembatasan budaya tersebut, yang juga akan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya insani yang dikandung dan dilahirkannya. Dapat dilihat dari data-data tentang: tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); rendahnya angka melek huruf serta partisipasi pendidikan, dan lain-lain yang diuraikan di atas.

Pembatasan budaya inilah yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai hegemoni budaya. Hegemoni budaya merupakan bentuk pembatasan budaya yang bersifat halus, sistematis sekaligus hegemonik. Bagaimana ideology hegemonik dapat membentuk dan mempengaruhi alam pikiran masyarakat? Secara sistematis ideology hegemoni "mencekoki" individu dan masyarakat dengan pikiran-pikiran tertentu, bias-bias tertentu, system-sistem preferensi tertentu. Dimana kekuasaan cenderung melakukan hegemoni makna terhadap kenyataan sosial (Ibrahim, dkk 1997).

Upaya untuk mendekonstruksi kerentanan perempuan membutuhkan 'dialog' antar lintas ilmu. Dalam hal ini antropologi diharapkan berdialog dengan bidang keilmuan lain, misalnya dengan ilmu filsafat dan Feminisme. Etno filsafat (*etno-philosophy*) dan filsafat feminis dapat dimasukkan untuk mendekonstruksi kerentanan perempuan. Etno filsafat mengembangkan tesis *politics of difference* dan mengkonteksikannya pada otonomi

kebudayaan. Dasar pemikirannya "perbedaan" menghasilkan "keunikan", dan keunikan harus dihormati sebagai "kearifan lokal". Dalam pembicaraan populer disebut sebagai "identitas budaya".

Otonomi kebudayaan semacam itu tentu perlu diterima dengan pemikiran kritis, karena dapat berkembang dalam suatu praktik politik yang mengarah pada "jebakan fundamentalisme" yang sesungguhnya menjadi pusat kritik feminisme. Problem feminisme dengan kearifan lokal adalah perlawanan interpretasi atas sebuah "wisdom", dapat mengganggu sistem patriarki sebuah kebudayaan sebagaimana dijelaskan Rocky Gerung dalam Jurnal Perempuan (Edisi No.57, Januari 2008: 69-77).

### **Feminisme & Perempuan Buruh Migran: Studi Kasus Perempuan Buruh Migran Jawa Timur di Hongkong**

Untuk mendeskripsikan akar budaya dan nilai-nilai yang mendasari kerentanan perempuan buruh migran dibutuhkan suatu kepekaan dan ketajaman analisis. Saat ini banyak dikembangkan penelitian gender dengan beragam teori dan metode, termasuk juga penggunaan teori dan metode feminisme. Feminisme melakukan kritik terhadap konstruksi patriarki yang melakukan dominasi dan opresi terhadap perempuan, hal ini menyebabkan feminisme disebut sebagai pemikiran dan teori kritis.

Pemikiran feminisme mempunyai peran penting dalam gerakan perempuan yang telah menghasilkan banyak Konvensi Internasional, diantaranya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi dan menjadi Undang-Undang No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Tidak mudah merumuskan apa yang disebut dengan feminis dan Feminisme. Gambaran singkat tentang feminisme dan gerakan feminis dimulai dari perjalanan yang sangat panjang pada abad ke-18 dan ke-19 dimana muncul akar feminisme liberal, radikal, sosialis/Marxis, masing-masing dengan penjelasan berbeda untuk asal-usul seksisme yang dialami perempuan dan saran penghapusannya. Perbedaan rumusan feminisme muncul di antara orang-orang yang berbeda kelas, ras dan generasi. Juga disebutkan bahwa ada perbedaan antara feminis akademis dan feminis aktivis.

Berikut ini adalah catatan perkembangan historis perjalanan Feminisme yang dapat dipetik manfaatnya bagi pengembangan kajian antropologi gender untuk mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Dalam feminisme liberal, dasar pemikiran manusia adalah otonom dan dipimpin oleh akal. Dengan akal manusia mampu untuk memahami prinsip-prinsip moralitas, kebebasan individu, dan menjamin hak-hak individu. Isu feminisme liberal adalah akses pendidikan yang sama bagi perempuan, perjuangan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan dan laki-laki. Sedangkan dasar pemikiran dalam Feminisme Radikal bahwa sistem seks/gender merupakan dasar penindasan terhadap perempuan. Isu Feminisme Radikal antara lain adalah tentang hak kesehatan reproduksi. Pada Feminisme Marxis dan Sosialis menekankan

pada perjuangan mengatasi penindasan atau ketimpangan gender disamping penindasan kelas sebagai salah satu sebab dari penindasan terhadap perempuan.

Dalam Feminisme gelombang ke-dua ada Feminisme Eksistensialis yang menjelaskan bagaimana sulitnya bagi perempuan untuk menjadi dirinya sendiri, karena perempuan menjadi yang lain (*the other*). Sedangkan Feminisme Posmodern menggali persoalan alienasi perempuan secara seksual, psikologis dan sastra dengan bertumpu pada bahasa sebagai sebuah sistem. Feminisme Multikultural dan Global mempunyai landasan pemahaman yang sama dengan teori posmodern di mana individu dilihat sebagai yang terfragmentasi. Bedanya bahwa Feminisme Multikultural lebih mempermasalahkan ide bahwa ketertindasan perempuan itu "satu definisi". pemahaman dasar Feminisme Multikultural adalah penekanan pada perbedaan dan pada pentingnya kajian kultural. Feminisme Ekofeminisme sejalan dengan feminisme multikultural dan global yang ingin memberikan pemahaman adanya keterhubungan antara bentuk penindasan manusia dan lingkungan alam. Isu yang diangkat adalah kerangka kerja dominasi maskulin dalam perusakan lingkungan (Arivia, 2003).

Meggie Humm dalam artikelnya "*feminist Literary Theory*", menyatakan bahwa teori feminis berbeda dengan teori sosial politik tradisional. Ia mengajukan tiga gagasan/persepsi baru untuk menunjukkan perbedaan tersebut: (1) bahwa gender merupakan konstruksi sosial dimana perempuan lebih ditekan daripada laki-laki; (2) patriarki bekerjasama mengkonstruksikan situasi itu; dan (3) pengalaman perempuan harus dijadikan dasar bagi masyarakat yang non-seksis (Lubis, 2006:91-92).

Dalam perjalanannya, perkembangan feminisme semakin pesat dan beragam. Ada Gerakan feminisme dan ekologis mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang tidak berdasarkan model-model dominasi sebagaimana ditulis oleh Vandana Shiva dan Maria Mies (2005).

Banyak peneliti yang mendialogkan permasalahan khas perempuan seperti kesehatan reproduksi dengan pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme mengungkapkan tentang ketidakadilan serta marginalisasi terhadap perempuan dalam balutan dominasi patriarki dalam semua bidang.

Feminisme merupakan teori sekaligus metode yang dapat digunakan untuk membongkar dominasi patriarki. Feminisme sudah mengembangkan berbagai peralatan metodologis dalam upaya membongkar struktur patriarki yang melekat dalam semua sistem kebudayaan yang essentialis. Intinya, setiap konstruksi tekstual, historis maupun logis, harus dibebaskan dari interpretasi tunggal, dan karena itu harus dapat diajukan dalam pemeriksaan dekonstruktif sebagaimana dijelaskan Rocky Gerung (2008: 69-77).

Metode Penelitian Feminis dirumuskan Shulamit Reinharz (2005) sebagai berikut: Metode penelitian feminis adalah metode yang digunakan dalam proyek penelitian oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai feminis atau sebagian dari gerakan perempuan; Metode penelitian feminis adalah metode yang dipakai dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal yang hanya menerbitkan penelitian penelitian feminis atau dalam buku yang menyebut dirinya demikian; Metode penelitian feminis adalah metode yang

digunakan dalam penelitian yang memperoleh penghargaan dari organisasi yang memberikan penghargaan pada orang-orang yang melakukan penelitian feminis. Dikatakan juga bahwa ada kecenderungan pada sebagian feminis yang sedang meneliti kebijakan sosial yang besar dengan sengaja tidak menyebutkan feminisme mereka untuk mengelakkan tanggapan penuh prasangka yang timbul dari orang-orang karena istilah tersebut.

Apapun aliran yang dianut, teori dan metode feminisme diharapkan dapat membantu dalam mengurai bahkan apabila diperlukan membongkar nilai-nilai dan konstruksi sosial bias gender, untuk mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Kajian-kajian berperspektif gender dengan teori dan metode feminisme yang sangat beragam menjadi pendukung upaya membuat perubahan, yakni mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagaimana nasib perempuan buruh migran dapat diperbaiki dalam kerangka pembangunan bangsa. Ketika permasalahan perempuan buruh migran dibahas dalam kerangka pembangunan bangsa, maka membutuhkan perubahan pola pikir yang mendasar. Bahwa permasalahan buruh migran tidak dapat hanya dilihat dari sisi ekonomi dan ketenagakerjaan semata, karena merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan multi-dimensi.

Dibutuhkan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang multi-dimensi, di mana aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik digarap secara bersama-sama, sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan dan mensejahterakan segenap anak bangsa. Bagaimana caranya agar buruh migran, termasuk perempuan buruh migran mendapat perlindungan dan penghargaan sebagaimana seharusnya dari pemerintah maupun keluarga dan masyarakat? Bagaimana caranya agar perempuan buruh perempuan tidak hanya dilihat sebagai komoditi ekonomi semata, tetapi juga dapat terlindungi dan berdaya?

Untuk membuat perubahan yang mendasar, maka model pembangunan ketenagakerjaan harus diubah dari model lama yang hanya melihat mereka sebagai SDM yang tak ubahnya dengan SDA yang dapat dimanfaatkan bahkan dieksploitasi habis-habisan ketika dibutuhkan. Model pembangunan ketenagakerjaan harus diubah menjadi model pembangunan berkelanjutan dan melibatkan peranserta mereka sebagai sumberdaya insani yang handal dan berdaya. Dalam hal ini pembangunan ketenagakerjaan diharapkan dapat diubah dengan menerapkan paradigma "Pembangunan Bersama Masyarakat", dimana prinsip-prinsipnya adalah: (1) partisipasi, (2) penguatan & pemberdayaan, (3) solidaritas & sinergi, (4) pemerataan, (5) keberlanjutan.

Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri harus dilihat secara makro sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Ketika seorang tenaga kerja Indonesia bermasalah di negeri orang, apapun statusnya di sana, maka kita wajib untuk melindungi. Permasalahan yang dialami tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri menyangkut citra bangsa dan negara, karenanya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Mengubah paradigma pembangunan merupakan hal yang penting dan mendasar apabila ingin membuat perubahan terhadap nasib tenaga kerja kita. Perubahan mendasar yang oleh Profesor Sarbini Sumawinata disebutkan sebagai "Revolusi Kebudayaan Untuk Pembangunan". Dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, dibutuhkan perubahan mulai dari cara pandang, cara berpikir sampai dengan sikap hidup. Dikatakan bahwa bagian-bagian yang masih sadar dari bangsa Indonesia sekarang ini, harus berani mengadakan perubahan-perubahan revolusioner atas sikap dan pandangan hidup dari kebudayaan kita, untuk dapat bangkit dari keterpurukan.

Bagaimana antropologi dapat menyumbangkan pemikiran membuat perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan, khususnya dalam pembangunan sumberdaya insani agar pembangunan dilaksanakan secara responsif gender? Melalui berbagai kajian maupun pendidikan antropologi diharapkan dapat diwujudkan perubahan pola pikir (*mindset*) dalam masyarakat dan kebijakan. Secara khusus diharapkan agar semakin ditingkatkan kajian-kajian tentang buruh migran yang dilakukan secara komprehensif dari berbagai disiplin ilmu, termasuk antropologi. Mata kuliah antropologi gender atau antropologi feminis dapat dikembangkan bersama-sama antropologi kependudukan untuk menjawab tantangan dan peluang dalam permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pendekatan antropologi diharapkan dapat mendekonstruksi hegemoni patriarki dan jeratan kapitalisme global yang membelenggu kaum perempuan, di mana pekerjaan sebagai buruh migran adalah pilihan yang sulit ketika tidak ada alternatif pilihan yang lain. Ketika kemiskinan membelenggu masyarakat dan keluarga mereka, maka perempuan dituntut untuk menjadi penyelamat krisis ekonomi keluarga. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kompleksitas problema perempuan buruh migran adalah gambaran tentang kompleksitas dan keruwetan peran dan posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat maupun dalam sektor kerja.

Trafiking atau perdagangan orang yang banyak melibatkan perempuan dan anak selain karena faktor kemiskinan, juga dipicu oleh kerentanan posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Anak-anak perempuan yang terpaksa dan dipaksa bekerja di luar pulau bahkan luar negeri merupakan gambaran nyata kerentanan dan ketidakberdayaan. Atas nama kepatuhan dan berbakti pada keluarga membuat mereka harus berkorban merelakan masa remaja dan masa sekolah mereka untuk bekerja ke negeri orang, di mana mereka tidak punya gambaran bagaimana kondisi dan situasinya. Bila berhasil meraup ringgit dan dollar maka mereka dielu-elukan sebagai pahlawan keluarga bahkan sebagai pahlawan devisa. Namun, bila mengalami kegagalan dan kesulitan, mereka harus menanggung sendiri.

Fenomena kerentanan para perempuan buruh migran dimulai sejak dari tempat asal. Belenggu kemiskinan dan dominasi budaya patriarki menjadi faktor penyebab kerentanan perempuan buruh migran. Pada umumnya mereka tidak dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup tentang bagaimana bekerja ke Luar Negeri. Sebagian besar berbekal tekad dan cenderung nekad karena tekanan sosial, budaya dan ekonomi. Orang tua malu

bila anak-anak remaja, khususnya anak perempuan tinggal di rumah tanpa melakukan apapun. Pada beberapa daerah bahkan ditemukan suatu kebiasaan bila anak perempuan mau bekerja keluar negeri akan dikawinkan terlebih dahulu. Karena orangtua merasa aman bila anaknya berstatus isteri daripada lajang ketika pergi bekerja ke luar negeri. Ketika terdengar kabar bahwa seorang gadis akan bekerja ke luar negeri maka banyak lelaki yang berusaha melamar untuk menjadikan sang calon TKW tersebut sebagai isteri. Motif para lelaki menikahi sangat jelas, selain berusaha melindungi dengan status isteri, sekaligus juga ada motif ekonomi. Sering dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan uang yang dihasilkan isteri selama bekerja di luar negeri yang digunakan untuk judi, mabuk, main perempuan bahkan untuk kawin lagi.

Kebijakan ketenagakerjaan dinilai juga kurang berpihak pada perempuan buruh migran yang selama ini dianggap sebagai 'pahlawan devisa'. Beberapa hasil kajian tentang nasib perempuan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri menunjukkan bahwa 80% dari permasalahan yang mereka hadapi berada di Indonesia, baru 20% merupakan permasalahan di negara tempat mereka bekerja. Permasalahan yang dihadapi perempuan buruh migran sangat kompleks. Mulai dari pemalsuan identitas/KTP berkaitan dengan usia; pemerasan yang bertubi-tubi dari tempat asal, di tempat penampungan, dinas/instansi terkait sampai dengan bandara; berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, dan lain-lain. Ada sebuah perusahaan jasa tenaga kerja di Jawa Timur yang memilih menerbangkan tenaga kerjanya melalui bandara Juanda dan transit ke Malaysia atau Singapura daripada harus lewat bandara Sukarno-Hatta karena ingin melindungi tenaga kerja mereka dari mafia bandara tersebut.

Berikut ini disampaikan karakteristik sosial budaya buruh migrant yang berasal dari Jawa Timur. Data tahun 2003-2006 dari Komisi E DPRD Jawa Timur menunjukkan bahwa Malaysia masih menempati rangking tertinggi sebagai Negara tujuan bekerja, diikuti Hongkong, Brunai, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi. Terdapat 10 kabupaten yang warganya banyak menjadi buruh migrant, yaitu: Kediri, Malang, Blitar, Ponorogo, Tulungagung, Jember, Banyuwangi, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Pada setiap daerah yang paling banyak pergi keluar negeri adalah perempuan, sebagaimana dapat dilihat dari data kabupaten Malang tahun 2008: perempuan sejumlah 5.389, laki-laki 195. Pekerjaan yang ditekuni di Negara tujuan antara lain: pekerja rumahtangga, *baby sitter*, merawat orang lanjut usia.

Mereka yang bekerja di Hongkong pada umumnya menyukai pekerjaan mereka dengan alasan: (1) Gaji cukup tinggi sekitar HD 3.250 (sekitar 4 juta rupiah); (2) ada *Labour Departement* yang memberi kepastian hukum dan perlindungan kepada perempuan buruh migrant; (3) adanya hari libur pada setiap hari Minggu dan adanya *public holiday* yang dapat digunakan untuk berkumpul dan berorganisasi antar sesama buruh migrant; (4) setiap tahun ada akses untuk *medical check up* bagi perempuan buruh migrant.

Adanya hari libur dan kebebasan untuk berorganisasi membuat mereka yang bekerja di Hongkong mempunyai akses untuk berbagi serta meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan. Ada yang memanfaatkan waktu luang untuk mengikuti

berbagai kursus: komputer, bahasa Mandarin/Canton/Inggris, masak, kecantikan, dan lain-lain. Ada yang mengisi waktu luang dengan kegiatan keagamaan. Ada yang membuat kegiatan seni musik dan tari. Ada pula yang mengembangkan perpustakaan dan penulisan buku.

Kebijakan pemerintah Hongkong yang memberikan waktu luang untuk libur dan dimanfaatkan untuk berkumpul dengan sesama buruh migrant menjadi fenomena menarik. Setiap hari Minggu Taman Victoria menjadi tempat berkumpul untuk berbagai aktivitas, sekedar rekreasi, pengajian, tempat untuk latihan nari dan musik, menyewa buku, dan lain-lain.

Ditengah-tengah kerumunan ribuan perempuan buruh migrant yang beraktivitas di Taman Victoria dijumpai pasangan sejenis yang sangat mudah dikenali, dari cara berdandan hingga perilaku mereka. Selain itu, disudut-sudut taman juga ada sekelompok laki-laki yang umumnya berasal dari Pakistan, mengintai perempuan buruh migrant untuk dijadikan pacar. Hubungan dengan pria Pakistan ini banyak menimbulkan kasus penipuan uang dan kehamilan diluar nikah. Perempuan buruh migrant seringkali tidak menyadari bahwa hubungan diluar nikah yang mereka lakukan dengan pria-pria asing tersebut membuat mereka sangat rentan mengalami kekerasan, terkena penyakit menular seksual dan gangguan kesehatan reproduksi. Selama mereka bekerja di Hongkong dijumpai beberapa permasalahan seperti: *overstay*, upah dibawah aturan, kabur karena pekerjaan berat, dituduh mencuri, kekerasan yang dilakukan majikan.

Gambaran tentang keberhasilan dan juga bahaya yang mengancam mereka yang bekerja di Hongkong dapat dijadikan pelajaran berharga bagi para buruh migrant, keluarga dan pemerintah, agar hati-hati dan memperhatikan segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika mereka bekerja di Negara lain. Hongkong sebagai Negara yang memiliki *Labour Departement* dengan aturan dan perlindungan yang tegas dan jelas saja masih ada berbagai permasalahan. Bagaimana dengan mereka yang bekerja di Negara lain, seperti Malaysia, Arab Saudi yang tidak ada aturan dan perlindungan yang jelas bagi perempuan buruh migrant?

Apapun yang dialami sejak keberangkatan, di Negara tujuan hingga pulang kembali ke tanah air, ternyata tidak menyurutkan minat mereka maupun calon-calon buruh migrant lainnya untuk berangkat mengais rejeki di negeri orang. Disinilah dibutuhkan kebijakan pemerintah agar upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan buruh migrant dapat dilakukan secara komprehensif dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Melalui uraian tentang perempuan buruh migrant, dengan studi kasus mereka yang bekerja di Hongkong, dapat dilihat bahwa para perempuan buruh migrant mengalami berbagai bentuk eksploitasi sejak mereka remaja dan tinggal dengan orangtua mereka. Ketika kemiskinan membelenggu keluarga, maka anak perempuan dianggap sebagai solusi cepat untuk atasi masalah ekonomi keluarga. Solusi cepat itu antara lain dengan mengirim mereka sebagai buruh migrant ke beberapa Negara yang dianggap dapat menghasilkan uang bagi keluarga.

Dari sisi Pemerintah belum ada respons positif dalam menangkap kecenderungan meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai buruh migrant di beberapa Negara. Ada program pemberdayaan perempuan, namun tidak secara khusus ditujukan kepada pemberdayaan perempuan buruh migrant. Juga belum dikembangkan sistem dan mekanisme perlindungan dan pemantauan secara terpadu bagi perempuan tenaga kerja sejak di daerah asal, di tempat penampungan hingga keberangkatan.

Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dirasakan perlu direvisi karena lebih banyak mengatur penempatan, bukan pada perlindungan dan pemberdayaan. Kedua Undang-Undang tersebut juga belum mencerminkan aturan perundang-undangan yang benar-benar melindungi serta responsive gender. Padahal sudah ada Undang-Undang No.7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No.11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Serta sudah ada Inpres No.9/2000 tentang penerapan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Belum ada perlindungan dan pemberdayaan secara menyeluruh terhadap perempuan buruh migrant. Belum ada program khusus bagi perempuan buruh migrant purna, yang pulang dengan membawa uang banyak, namun miskin akses dan ketrampilan dalam mengelola uang hasil jerih payahnya. Mereka sering menjadi korban penipuan tetangga, kerabat, bahkan aparat desa, dengan iming-iming peluang usaha yang tidak jelas dan berakhir dengan kerugian.

Mobilitas penduduk untuk bekerja di Negara lain menjadi fenomena yang jamak, lazim dan bahkan menjadi *trend* baru bagi gadis-gadis muda, terutama yang berasal dari daerah yang mengalami kemiskinan. Dunia menjadi tanpa batas, angan-angan bekerja tidak lagi ke kota besar sebagaimana terjadi sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, tidak lagi menjadi impian gadis-gadis muda pedesaan. Tempat bekerja yang menjadi bahan pembicaraan dan impian di antara mereka adalah Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia dan lain-lain.

Perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat sebagaimana digambarkan pada perempuan buruh migran membutuhkan juga perubahan dalam paradigma keilmuan, pendekatan dan metodologi dalam melakukan kajian. Muncul realitas sosial baru yang semula tidak pernah terbayangkan, terjadi akibat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Mobilitas manusia menjadi semakin intensif dengan gerakan dan perpindahan yang luarbiasa ke segala penjuru dunia melampaui batas ruang dan waktu, melewati batas geografis dan batas kultural.

Pekerjaan sebagai buruh migrant membuat para perempuan masuk dalam pusaran globalisasi gaya hidup. Internet, hape BB, FB, transfer uang, baju tanktop, kosmetik dan tas bermerk, adalah bahan pembicaraan yang dapat didengar apabila mereka pulang ke daerah asal dan bertemu sesama buruh migran. Ada yang mengalami *culture shock* dengan beragam ekspresi, juga ada yang menjalani perubahan pekerjaan dan gaya hidup tersebut dengan

biasa-biasa saja tanpa mengalami keterkejutan budaya. Ada yang menjalani pekerjaan di luar negeri sebagai bentuk pembelajaran, bekerja sambil belajar, mereka mampu tampil sebagai duta-duta bangsa, mahir berbahasa asing, dapat menjadi pemandu wisata ketika ada tamu dari Indonesia yang berkunjung ke Hongkong, tetapi tidak kehilangan identitas budaya Indonesia.

Di sisi lain, fungsi tradisional keluarga dan otoritas orangtua melemah sejalan dengan derasnya pusaran arus globalisasi. Ketahanan dan kekuatan keluarga melemah akibat mobilitas anggota keluarga. Mencari uang di Luar Negeri tidak semata-mata masalah ekonomi, namun telah menjadi sebagai gaya hidup serta sebagai suatu kebutuhan. Dalam kondisi seperti itu, fungsi-fungsi keluarga seperti fungsi pemeliharaan keluarga menjadi terganggu. Untuk bekerja di Luar Negeri, anak-anak mereka ditinggalkan pada saudara atau orangtua. Beberapa kajian menunjukkan bahwa banyak anak TKI yang terlantar, di mana gizi, kesehatan serta pendidikan mereka kurang mendapat perhatian. Baru-baru ini media televisi menampilkan sepasang kakek-nenek miskin yang tinggal di perkampungan nelayan kumuh, harus merawat bayi umur 6 bulan yang ditinggalkan ibunya bekerja di Luar Negeri. Yang mengenaskan bayi tersebut diberi minum air gula, yang dibuat dari pemanis buatan karena tidak mampu membeli susu.

Dampak globalisasi gaya hidup yang menyertai pekerjaan sebagai buruh migrant memaksakan perubahan serta strategi bertahan hidup. Ungkapan Jawa tentang "*mangan ora mangan sing penting kumpul*", yang selama ini ampuh menjadi pengikat keluarga, tidak lagi dapat dipertahankan karena tekanan kemiskinan dan desakan kebutuhan materi yang lebih kuat.

Ketika perempuan buruh migrant ditempatkan sebagai pahlawan keluarga dan pahlawan keluarga, maka harus ada perubahan dalam pola pikir dalam keluarga dan masyarakat tentang peran, fungsi dan kedudukan perempuan. Penggambaran perempuan buruh migrant adalah sebagai yang harus selalu siap berkorban harus dapat diubah. Apabila kita sepakat bahwa budaya adalah merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap berbagai ketidak-adilan yang dialami kaum perempuan, maka inilah saatnya untuk mengupas dan mengkritisi kebudayaan dan mendekonstruksikan dan mengkonstruksikan kembali peran gender laki-laki dan perempuan secara lebih setara dan adil.

Bagaimana antropologi dapat berperan dalam merespons perubahan yang sangat cepat dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya menyorot fenomena perempuan buruh migrant? Dalam menghadapi realitas sosial yang berubah sangat cepat, maka membutuhkan perubahan dalam pendefinisian dan pemaknaan atas sebuah realitas. Sebuah realitas sosial yang multi-dimensi misalnya, tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan secara tunggal, melainkan dapat melahirkan alternatif pemikiran yang sangat kaya dan beragam. Sebagaimana halnya realitas sosial perempuan buruh migrant, dapat dianalisis dari beragam pemikiran. Feminisme liberal misalnya, mengangkat isu akses yang sama untuk memperoleh pendidikan, hak sipil dan ekonomi bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki. Dalam hal ini permasalahan perempuan buruh migrant dilihat dari keterbatasan akses

dalam pendidikan, hak sipil dan ekonomi. Sedangkan feminisme eksistensialis melihat bahwa perempuan ditempatkan sebagai yang Liyan, sebagai "*the other*", membuat perempuan sulit untuk menjadi dirinya sendiri dalam ranah domestik maupun publik. Walaupun menjadi pahlawan keluarga dan pahlawan devisa, perempuan tetap ditempatkan sebagai *the other*.

## **Penutup**

Sebagai penutup disampaikan bahwa permasalahan perempuan buruh migran sangat penting untuk dibahas dalam kerangka pembangunan bangsa, di mana membutuhkan perubahan pola pikir secara mendasar. Salah satu perubahan mendasar adalah bahwa permasalahan buruh migran tidak dapat hanya dilihat dari sisi ekonomi dan ketenagakerjaan semata, karena merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan multi-dimensi.

Dibutuhkan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang multi-dimensi, di mana aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik digarap secara bersama-sama, sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan dan mensejahterakan segenap anak bangsa. Suatu upaya yang dimaksudkan agar buruh migran, termasuk perempuan buruh migran mendapat perlindungan dan penghargaan sebagaimana seharusnya dari pemerintah maupun keluarga dan masyarakat. Dalam kebijakan pembangunan bidang tenaga kerja ini dapat dilihat pentingnya memasukkan perspektif gender, termasuk ke dalam Undang-Undang Tenagakerja. Dalam hal ini dirasakan pentingnya penerapan Inpres No.9/2000 tentang Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Teori dan konsep antropologi serta feminisme dapat berkontribusi dalam menganalisis fenomena perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat, termasuk maraknya pekerjaan sebagai buruh migran. Semakin meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai buruh migrant membutuhkan analisis kritis sejauhmana perubahan tersebut berpengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan buruh migran serta perlindungan anak-anak mereka. Ke depan sangat penting untuk melakukan pengembangan kajian dan mata kuliah dalam ruang lingkup antropologi gender dan feminisme, serta antropologi kependudukan.

## Daftar Pustaka

Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), 2003.

Fashri Fauzi, *Penyingkapan Kuasa Simbol: Aproprasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Penerbit Juxtapose, 2007.

Foucault, Michel, *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, penerjemah Rahayu S. Hidayat, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama dengan FIB Universitas Indonesia, 2008

Fromm, Erich, *Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender*. Yogyakarta: Jalasutra, 2002.

Idi Subadi, *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta, Jalasutra, 2001.

Lubis, Akhyar Yusuf, *Dekonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS), 2006.

Moore, Henrietta L, *Feminisme and Anthropology*, UK: Polity Press in association with basil Blackwell, 1991.

Reinharz Shulamit, *Metode-metode Feminis dalam Penelitian Sosial*, terjemahan, diterbitkan di Jakarta oleh Women Research Insititute, 2005.

Shiva Vandana dan Maria Mies, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan* Yogyakarta: IRE Press, 2005.

Gerung Rocky, "Feminisme Versus Kearifan Lokal", dalam **Jurnal Perempuan** Edisi ke-57, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, Januari 2008,

Laporan Kajian "Membangun Model Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Keluarga Buruh Migran" (Studi Kasus di Jawa Timur), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Yayasan Sekar Saraswati, Desember 2009.

\*) disampaikan dalam Seminar Antropologi Terapan "Antropologi dalam Lintasan Pembangunan Indonesia", yang diselenggarakan oleh AAI dan FKAI. Cisarua, Bogor, tanggal 22 Juli 2010.